

Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara

Oleh
Fatmawati Rumra

ABSTRAK

Informasi Pembangunan merupakan sarana penting bagi Pembangunan Nasional untuk masyarakat kota dan desa. Membangun dimulai dari ide dan pemikiran yang dilengkapi dengan informasi yang relevan dan perlu disebar luaskan dan diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat, karena itu terlebih dahulu pesan dan kebijakan pemerintah harus disebar luskan guna membangkitkan semangat serta partisipasi masyarakat. Salah satu upaya mendorong percepatan pembangunan masyarakat adalah melalui strategi komunikasi yang membawa nilai-nilai baru yang positif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut. Kehadiran kelembagaan informasi pemerintah menjadi sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan pemerintah untuk mengelola informasi dalam membangun masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan itu untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat maka diperlukan adanya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dan manajemen system informasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Pengelolaan, Informasi Publik

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan akan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya tidak hanya untuk aktifitas layanan atau pengelolaan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi kebutuhan dalam mengembangkan teknologi informasi serta penunjangnya, seperti perangkat lunak, jaringan dengan demikian maka komunikasi dan informasi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, masyarakat dan warga Negara, karena komunikasi dan informasi adalah wahana yang utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi sesamanya, karena mereka saling membutuhkan dan juga manusia bisa berkembang dengan berkomunikasi, sehingga komunikasi penting bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktifitasnya.

Sejalan dengan pokok pembahasan mengenai system penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota di Kabupaten Maluku Tenggara, secara umum sebelum diberlakukan otonomi daerah, informasi pembangunan disampaikan oleh juru penerangan dan parah petugas penyuluh lapangan dari instansi masing-masing di daerah seperti, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan dll.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang diganti dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka system pelayanan informasi pembangunanpun mengalami perubahan, yakni cenderung hanya membebaskan kepada media massa, sementara informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah yang

penting diketahui dan dipahami oleh masyarakat, tidak semuanya dapat tercover oleh media massa. Maka penyebaran informasi pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini dirasakan sangat kurang sehingga diharapkan dengan pengelolaan informasi public pada lembaga informasi dan komunikasi sangat diperlukan.

Mencermati berbagai kewenangan pemerintah daerah bersama jajaran Dewan Perwakilan Daerah menetapkan peraturan daerah tentang kelembagaan (perangkat) daerah yang cenderung lebih berorientasi kepada lembaga yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, menyebabkan kelembagaan infokom menjadi salah satu instansi yang cenderung tidak menjadi prioritas utama. Pada dasarnya jika dicermati urgensi fungsi kelembagaan infokom yang mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pemerintah, maka dengan demikian eksistensi kelembagaan ini seharusnya lebih diprioritaskan bukan seperti jenjang dan bentuk kelembagaan informasi daerah ada yang berupa Dinas dan Badan yang berada pada posisi tertentu, ada yang berupa Kantor dan Bagian. Perbedaan posisi atau tingkat kelembagaan ini, bukan hanya berimplikasi pada persoalan koordinasi, tetapi yang lebih nyata adalah persoalan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian yakni, bagaimana system penyampaian informasi pembangunan yang dilaksanakan informasi pemerintah daerah khususnya Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan rumusan masalah adalah; 1. Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menghimpun data dan informasi public. 2. Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam memproses data dan informasi public. 3. Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menyampaikan atau menyalurkan informasi public.

2. Kelembagaan Infokom di Era Otonomi Daerah

Mencermati pasal 121 undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan tentang perangkat daerah kabupaten kota, selanjutnya pada pasal 128 ayat (1) dijelaskan tentang penetapan organisasi perangkat daerah melalui penetapan peraturan daerah dengan memperhatikan factor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan daerah.

Perangkat daerah yang dimaksud pada pasal 121 dan 127 adalah Sekretaris daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah yang merupakan unsure otonomi daerah, lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan arah kebijaksanaan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau Rumah Sakit daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dengan landasan undang-undang No 3 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 128 dengan melalui penataan daerah maka terbentuklah perangkat daerah dimana kelembagaan informasi dan komunikasi daerah. Didalam penetapan kelembagaan informasi dan kelembagaan daerah, pemerintah daerah tidak memiliki pandangan yang sama tentang nama kelembagaan dari bentuk kelembagaan informasi dan komunikasi daerah. Dimana pada kondisi obyektif yang nampak saat ini bahwa kelembagaan informasi dan komunikasi daerah bermacam-macam bentuk kelembagaannya sesuai dengan peraturan daerah pada masing-masing daerah.

3. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Perlunya informasi dan komunikasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi diperlukan adanya data yang akan diolah diunit pengelolah transformasi data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar didasarkan pada informasi yang benar dan berdasarkan pada data yang akurat. Masalah utama dari suatu informasi adalah konsistensi dari suatu data, data dapat menjadi tidak konsistensi dalam beberapa cara antara lain adalah : 1. Defenisi data, beberapa organisasi atau unit tidak sepakat tentang defenisi dan arti data. 2. Struktur data, data yang sama mempunyai format yang berbeda di beberapa tempat. 3. System penyimpanan, data yang sama disimpan dengan struktur yang berbeda di beberapa tempat. 4. Waktu perubahan, data dapat diperoleh/diolah dalam jangka waktu bulanan, mingguan, atau secara intensif di beberapa system serta membuat beberapa copy di beberapa tempat (sumber, Keputusan Menteri Komunikasi Informasi RI No. 69/Kep/M/Kominfo/10/2004) tentang panduan teknis manajemen data, Informasi dan Organisasi serta system Informasi Pemerintah.

Untuk mencapai suatu informasi dan komunikasi yang benar maka salah satu upaya mendorong percepatan pembangunan masyarakat adalah melalui strategi komunikasi yang membawa nilai-nilai baru yang positif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut. Kehadiran kelembagaan informasi pemerintah daerah menjadi sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan pemerintah daerah untuk mengelolah informasi di daerah dalam membangun masyarakat daerah. Sejalan dengan itu untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat maka diperoleh adanya pembangunan dan pengolahan infrastruktur dan manajemen system informasi pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sehingga keberadaan Dinas Infokom sangat diperlukan.

Keberadaan Infokom daerah seperti Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara dalam perencanaan system informasi nasional merupakan upaya pemerintah dalam rangka membangun suatu system pemerintahan yang terinteraksi dari tingkat kabupaten/kota sehingga pemerintah pusat sebagai pelaksana Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang akan diatur pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi daerah otonom, dimana system informasi nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimaksudkan agar terbangun infrastruktur system informasi pemerintahan yang handal dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dibidang informasi dan komunikasi.

Upaya dalam meningkatkan layanan pemerintah dalam system informasi yang terintegrasi dan handal, diperlukan kesamaan pemahaman, tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, serta dukungan dari berbagai pihak sebagai respon positif terhadap program pemerintah dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi (keputusan Menkoinfo No. 69/Kep/M.Kominfo/10/2004) tentang pembangunan dan pengolahan infrastruktur dan manajemen system informasi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data informasi dan komunikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka peranan pemerintah kabupaten/kota dan dukungan oleh kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah sebagai pelaksana terdepan dalam melayani masyarakat di bidang informasi maka perlu kolaborasi dalam ruang lingkup system informasi nasional untuk berperan penting dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan sebagai pemerintahan berkaitan langsung dalam beberapa perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi khususnya pemerintah kabupaten/kota dimana system informasi pelayanan kepada masyarakat memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan system informasi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberadaan pemerintah kabupaten dan kota sebagai truktur pemerintahan yang paling dekat dan berpengaruh langsung kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuatnya maka kelembagaan informasi dan komunikasi daerah harus menjadi suatu lembaga yang terpenting dalam mengelola informasi mulai dari menghimpun informasi, memproses informasi, dan menyebarkan informasi, selain itu seharusnya perlu juga disediakan karena penyedia informasi tersebut yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah, cepat dan murah, karena pemerintahan kabupaten dan kota merupakan pemerintahan yang paling banyak terkait dengan penyedia layanan kepada masyarakat terutama pada bidang informasi dan komunikasi melalui Dinas Infokom sebagai pengelola informasi public di daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Mengumpulkan Data Informasi Publik

Kelembagaan informasi komunikasi yang ada saat ini berbeda baik nama kelembagaannya maupun tingkat esalon kelembagaannya. Dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yang telah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tenggara Dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi meliputi, pendayagunaan media, radio siaran pemerintah kota serta penyelenggaraan siaran suasta. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dimana setiap kegiatan selalu diharapkan mencapai target 12 kali selama setahun atau 1 kali setiap bulan dari berbagi kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan menghimpun data dan informasi public serta penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan dan radio siaran pemerintah Kabupaten.

Selain itu penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan informasi dan komunikasi dan pendayagunaan kelembagaan dan radio siaran pemerintah kabupaten, sehingga jenis data informasi public yang dihimpun berkaitan dengan peraturan daerah kabupaten, kebijakan Bupati terutama perizinan, serta perpajakan dan sebagainya sebagai bahan sosialisasi dengan maksud untuk menyesuaikan pelayanan public sesuai dengan harapan Bupati Maluku Tenggara. Kegiatan lainnya adalah melakukan klipping surat kabar sebagai bentuk kegiatan menghimpun, mendata karena hal ini merupakan bagan evaluasi kepada dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara

untuk dijadikan sebagai bahan laporan kepada Bupati frekuensi kegiatan pertiga kali setiap bulannya dengan mengelompokkan setiap kegiatan melalui surat kabar dengan bobot yang telah ditentukan, hal ini sejalan dengan fungsi pelaksanaan pengendalian teknis operasional dibidang pengembangan informasi dan komunikasi, pendayagunaan media informasi.

Kelembagaan informasi dan komunikasi di daerah pada perinsipnya mengalami perubahan nama lembaga dan tupoksi lembaga yang tidak seragam seperti ada masa Departemen Penerangan Era Orde Baru atau sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah, namun kelembagaan informasi dan komunikasi tersebut masi tetap melakukan tugas-tugas dengan menghimpun dan mengumpulkan data/informasi public. Hasil penelitian penunjukan bahwa lembaga informasi dan komunikasi daerah yang berbeda nama dan tingkat jenjang truktur tetapi tetap proaktif untuk menghimpun informasi public khususnya yang diproduk oleh pemerintah daerah, seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, perizinan, perpajakan dan distribusi menjadi sangat penting untuk dihimpun karena informasi tersebut sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

Mengenai informasi nasional yang diproduk pemerintah pusat sepertinya tidak menjadi suatu kewajiban untuk dihimpun oleh setiap lembaga informasi dan komunikasi daerah, disebabkan karena lembaga informasi dan komunikasi daerah tidak memiliki garis struktural dengan kelembagaan informasi dan komunikasi ditingkat propinsi dan tingkat pusat, begitu juga anggaran yang dipergunakan adalah murni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota.

Lembaga informasi dan komunikasi yang menjadi obyek penelitian memang ada kecenderungan tidak mendiskripsikan suatu keseragaman dalam pelaksanaan tugas menghimpun informasi public, hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan visi dan misi dari lembaga informasi dan komunikasi tersebut sehingga aktivitas mengalami proses dan frekuensi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah. Fenomena seperti ini menunjukan adanya konsistensi dari daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan pengolahan informasi oleh lembaga informasi daerah, namun konsistensi tersebut sebagai suatu landasan bahwa kelembagaan informasi dan komunikasi daerah masih menjadi terdepan dalam pengelolaan informasi public dengan tidak memandang status dan bentuk kelembagaannya yang bermacam-macam karena hal itu tidak menjadi suatu hambatan seperti yang tergambar pada aktivitas dalam menghimpun/mengumpulkan informasi public kelembagaan informasi dan komunikasi yang menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan kelembagaan informasi dan komunikasi daerah khususnya Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara tidak serta merta menghimpun informasi public dari pemerintah pusat, maka suatu persoalan tersendiri yang perlu dipikirkan kedepan supaya ada sinergitas dalam menghimpun informasi public baik informasi public produk daerah maupun nasional karena kedua informasi public tersebut sangat perlu disosialisasikan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Maka perlu adanya suatu program perpaduan pelaksanaan system informasi nasional dan daerah dengan tujuann untuk mendorong kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah dengan mengoptimalkan infrastruktur dalam pengelolaan system informasi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota agar dapat menciptakan

jaringan informasi yang terintegrasi antara semua elemen pemerintah dan semua strata dengan tujuan untuk membangun kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah.

2. Memproses Informasi Publik.

Untuk memperoleh informasi dan komunikasi public terutama kegiatan yang terkait dengan memproses data/informasi public, yang melaksanakan tugas ini di bebaskan kepada bidang pengembangan informasi dan komunikasi dengan dijabarkan dalam dua seksi yang ada di Dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pengembangan dan pengelolaan dengan dasar peraturan daerah, khusus seksi pengembangan ditugaskan untuk menyusun rencana kerja dengan menyesuaikan kebijakan yang telah digariskan dalam jabatan dan tugas sehingga dalam penyusunan/pengelolaan data informasi disesuaikan dengan kebutuhan waktu termasuk presentasi dari media, sehingga setiap satu bentuk berita diproses sesuai kebutuhan dalam bentuk laporan dan hal ini dibuat setiap bulannya. Dipandang perlu untuk pengembangan informasi dan komunikasi juga menyusun materi-materi lain yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk konsumsi dinas informasi dan komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsinya, demikian sebagai laporan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara sebagai pengambil kebijakan.

Kegiatan pemrosesan data dan informasi adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan system informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas informasi di kabupaten dan kota, nampaknya informasi dan komunikasi daerah dapat menjawab tantangan yang berkembang dengan melakukan pemrosesan data informasi dengan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimanfaatkan secara optimal agar data tersebut menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu diharapkan juga dapat menciptakan kemudahan-kemudahan dalam pemanfaatan untuk mensukseskan data dan informasi tersebut.

Sarana yang berbasis informasi komunikasi dan teknologi yang dimanfaatkan lembaga informasi dan komunikasi Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diperoleh masih sinergi dengan sarana yang tergolong manual, karena bagaimanapun juga kondisi masyarakat masih berada pada tingkat atau strata yang berbeda. Oleh karena itu disatu sisi sarana yang tergolong manual cukup efektif untuk digunakan dalam pemrosesan informasi melalui suatu kegiatan tradisional yang mana masyarakat masih meminatinya. Hasil penelitian atau temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan untuk digunakan dalam rangka memajukan berbagai potensi dengan cara melakukan pemrosesan informasi untuk memberikan informasi yang terkait dengan potensi pembangunan terutama bidang ekonomi yang dapat menjadi suatu nilai investasi yang cukup memberikan harapan kedepan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pentingnya teknologi informasi tersebut maka semua pemrosesan data dan informasi melalui teknologi informasi yang dilakukan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara hendaknya lebih maksimal.

3. Penyebaran Informasi Publik

Penyebaran atau pelayanan informasi public terutama kegiatan yang terkait dengan tugas pelayanan/penyebaran informasi public disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, hal ini dilakukan secara koordinatif berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat, selain itu juga melalui dialog interaktif/ceramah, diskusi baik langsung maupun melalui media

informasi dan komunikasi, kemudian melakukan produksi siaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pola siaran yang ditetapkan, melaksanakan siaran berita secara kontinyu baik relay berita maupun pemberitaan khusus dan melakukan kerjasama dengan pengelolaan siaran yang professional dengan lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk memenuhi jenis-jenis kegiatan disinergikan dengan tugas/fungsi Dinas Informasi dan Komunikasi dengan instansi pelayanan public di Kabupaten Maluku Tenggara mengumpulkan dan menyusun laporan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai proses umpan balik, maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi fasilitator informasi public untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengoptimalkan informasi dengan segala sarana/prasarana yang dimiliki lembaga lain yang bermitra dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan hasil analisis kelembagaan informasi dan komunikasi yang menjadi obyek dalam kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi public menjadi sangat penting untuk dilaksanakan melalui beberapa sarana komunikasi yang dimiliki baik yang berbasis ICT maupun penyebaran dengan bentuk tatap muka. Terbukti dengan frekuensi penyebaran informasi public dengan memanfaatkan semua fasilitas informasi yang ada baik dalam lingkungan internal lembaga maupun pemberdayaan kemitraan dengan melakukan koordinasi secara aktif.

Hal yang positif adalah, kelembagaan informasi dan komunikasi daerah seperti Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara masih mengutamakan tugas pelaksanaan penyebaran informasi public kepada masyarakat, karena disadari bahwa segala bentuk yang terkait dengan informasi produk pemerintah adalah sesungguhnya wajib diketahui dan dipahami oleh public, dengan demikian lembaga informasi dan komunikasi pemerintah daerah secara efektif melakukan kegiatan yang berbentuk sosialisasi dengan memanfaatkan potensi kelembagaan yang ada. Sedangkan yang menjadi persoalan tersendiri adalah informasi public nasional yang tidak sinergi secara struktur untuk disosialisasikan oleh lembaga informasi dan komunikasi daerah, hal ini dapat digambarkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh lembaga informasi dan komunikasi tersebut telah memperlihatkan penyebaran informasi public produk pemerintah pusat dengan baik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peranan lembaga informasi dan komunikasi (Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara) sangat strategis dalam rangka penyebaran informasi public juga menyerap aspirasi masyarakat untuk dihimpun dan diproses sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah. Selanjutnya tingkat koordinasi disejajarkan kelembagaan pemerintah sebagai upaya dalam menghimpun informasi yang akan diproses dan disosialisasikan ke public dengan melalui jenis-jenis informasi dari berbagai macam kegiatan penyusunan rencana dan program dibidang pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan informasi dan radio pemerintah kota maupun radio swasta. Maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara senantiasa berupaya

untuk meningkatkan pengelolaan informasi agar kualitas informasi valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Fungsi kelembagaan informasi dan komunikasi dalam mengolah informasi public, hasil temuan menunjukkan bahwa kelompok informasi yang ada sebagai binaan Dinas informasi dan komunikasi hendaknya selalu bersinegi dalam rangka menghimpun, memproses dan menyebarkan informasi secara teratur. Selain itu teknologi informasi menjadi sangat penting khususnya website, karena dapat menyiapkan data dan informasi tentang potensi Kabupaten Maluku Tenggara dengan tujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan senantiasa melakukan koordinasi terkait kebijakan dengan instansi lain sebagai suatu kegiatan kongkrit untuk menghimpun informasi public, dan selanjutnya diolah dengan melalui komputerisasi sebagai salah satu sarana untuk memproses informasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa dalam penyebaran informasi dan komunikasi masih mengaktifkan informasi secara langsung secara intensif.

2. Rekomendasi

Untuk kelancaran pengelolaan informasi public, khususnya informasi public yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres dan sebagainya agar dapat tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat daerah dengan memprogramkan suatu peraturan pemerintah yang tidak berseberangan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dalam upaya menciptakan kegiatan-kegiatan keterpaduan system informasi nasional dengan system informasi daerah, dalam rangka mengintegrasikan system informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat sehingga proses layanan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam bentuk upaya untuk memperlancar pengolahan informasi public baik bersifat nasional maupun daerah dan selanjutnya aspirasi dari masyarakat akan menjadi bahan untuk pengolahan informasi pada pemerintah yang terkait dengan kebijakan. Hal ini sangat perlu karena dapat mengatur informasi dengan melalui keterpaduan system informasi dengan menciptakan jaringan informasi yang terintegrasi dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dan semua strata.

Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi dalam era otonomi daerah sangat terasa dengan tidak adanya komunikasi secara rutin yang dibangun oleh pemerintah pusat (Departemen Komunikasi dan Informatika) dengan kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah, oleh karenanya interaksi positif dari kelembagaan informasi dan komunikasi baik yang berkedudukan di daerah maupun di pusat harus dibangun menjadi suatu bentuk yang tidak terpisahkan secara fungsional dan operasional. Karena yang terpenting adalah bagaimana kelembagaan informasi dan komunikasi dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi ujung tombak untuk mengelola informasi public pusat dan daerah dan dapat bersinegi dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah.

Perlunya informasi dan komunikasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi diperlukan adanya data yang akan dioleh diunit pengelolah tranformasi data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar didasarkan pada informasi yang benar dan informasi yang benar didasarkan pada data yang akurat kemudian secara berkala akan menjadi laporan pelaksanaan kegiatannya kepada lembaga informasi dan komunikasi pemerintah sebagai evaluasi pengelolaan informasi public dalam pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A.S. 1990. *Manusia dan informasi*, Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Changara Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurudin. 2004. *System Komunikasi Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Widjaja, H. A. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menkoinfo Nomor 69/Kep/M/10/2004 tentang Panduan Teknnis Manajemen Data, Informasi Organisasi dan Sistem Informasi.